

**PENGARUH *TRADE OPENNESS*, INFLASI, DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kasus pada 9 Negara ASEAN Tahun 2014-2023)**



Skripsi Oleh:

MUHAMAD RAFAEL PRAMANSYAH

01021282126110

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2025

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH *TRADE OPENNESS*, INFLASI, DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
(STUDI KASUS PADA 10 NEGARA ASEAN TAHUN 2014-2023)**

Disusun Oleh :

Nama : Muhamad Rafael Pramansyah

NIM : 01021282126110

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING



Tanggal : 10 Desember 2024

Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si

NIP. 196903142014092001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PENGARUH *TRADE OPENNESS*, INFLASI, DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kasus pada 9 Negara ASEAN Tahun 2014-2023)

Disusun oleh

Nama : Muhamad Rafael Pramansyah

NIM : 01021282126110

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 30 Desember 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Indralaya, 06 Januari 2025

Ketua



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si

NIP. 196903142014092001

Anggota



Feny Marissa, S.E., M.Si

NIP. 199004072018032001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI
13-1-2025
JUR. EK. PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Rafael Pramansyah
NIM : 01021282126110
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Pengaruh *Trade Openness*, Inflasi, dan *Good Governance* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada 9 Negara Asean Tahun 2014-2023)

Pembimbing : Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
Anggota : Feny Marissa, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 30 Desember 2024

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 06 Januari 2025

Pembuat Pernyataan,

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 13-1-2025
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Muhamad Rafael Pramansyah
NIM. 01021282126110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

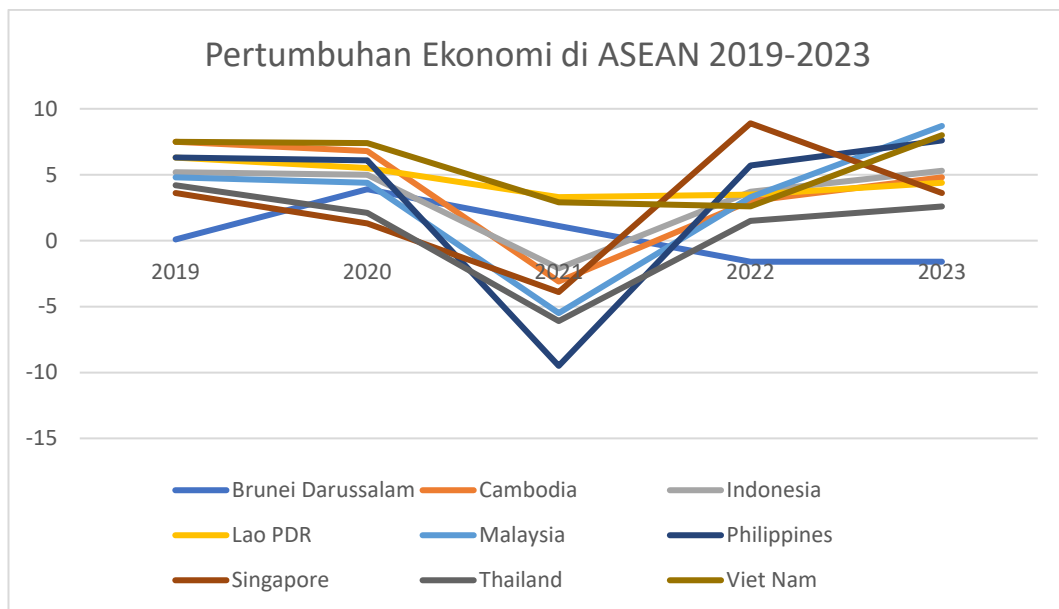
Salah satu cara untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya, yang juga berfungsi sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi ekonomi negara tersebut. Perbaikan kondisi ekonomi suatu negara dalam jangka waktu tertentu disebut pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan kapasitas produksi ekonomi, yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan nasional, juga dapat dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi (Putra, 2018).

Tingkat pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan laju GDP atau tingkat GDP. Dalam dunia ekonomi, pertumbuhan sering kali menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan sekaligus tujuan jangka panjang bagi banyak negara, termasuk 9 negara di kawasan Asia Tenggara atau negara-negara anggota ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara), yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Kamboja. Alasan utama tidak dimasukkannya Timor Leste dan Myanmar adalah karena keterbatasan data yang memadai dan konsisten untuk kedua negara tersebut selama periode penelitian.

Secara umum, ASEAN dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial, mengembangkan kebudayaan Asia Tenggara, menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, serta memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan di

antara negara-negara anggotanya (Adila, 2021).

Dari sudut pandang ekonomi, sembilan negara di kawasan Asia Tenggara telah mengalami perubahan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi mereka selama sepuluh tahun terakhir. Perubahan tersebut menjadikan mereka faktor penentu dalam dinamika pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara ASEAN. Laju pertumbuhan PDB di Negara Kawasan ASEAN seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN 2019-2023 (%)

Sumber : World Bank, 2024

Sebagian besar negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan pada tahun 2020, yang dapat diasosiasikan dengan dampak pandemi COVID-19. Negara seperti Brunei Darussalam, dan Thailand mengalami penurunan drastis hingga mencapai angka negatif.

Setelah penurunan tajam pada tahun 2020, hampir semua negara menunjukkan pemulihan pada 2021 dan tren kenaikan berlanjut hingga 2023. Indonesia pemulihan dimulai pada 2021 dengan pertumbuhan sekitar 3%, dan

pada 2022-2023 meningkat stabil mendekati 5%. Indonesia tetap menunjukkan stabilitas yang positif pasca-pandemi, meskipun tidak secepat negara seperti Singapura dan Filipina yang menunjukkan pemulihan yang sangat kuat.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Di antara faktor-faktor ini, terdapat beberapa aspek yang menarik untuk ditelaah, seperti investasi, inflasi, dan peredaran uang. Salah satu faktor eksternal yang semakin mendapat perhatian dari para ahli dan organisasi internasional adalah *trade openness*.

Trade openness merupakan proporsi dari PDB (GDP) suatu negara, di mana indikator utamanya adalah rasio antara jumlah ekspor dan impor. Sebuah negara dianggap memiliki *trade openness* ketika aktif melakukan perdagangan internasional, baik melalui ekspor maupun impor. Keterbukaan ini memungkinkan negara untuk lebih terhubung secara ekonomi dengan negara lain, meningkatkan akses terhadap pasar global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Marlina, 2018). Hal ini dapat dilihat dari data *Trade Openness* berikut:

Tabel 1. 1 Trade Openness ASEAN (% GDP)

Country	2021	2022	2023
Brunei	147.1	147.0	136.6
Cambodia	129.1	123.2	113.5
Indonesia	40.2	45.5	41.3
Lao PDR	78.5	81.4	81.8
Malaysia	134.0	146.7	131.8
Philippines	63.5	72.4	67.4
Singapore	329.8	333.0	311.2
Thailand	117.1	132.9	129.2
Vietnam	163.2	186.7	183.8

Sumber: World Bank 2024

Secara keseluruhan, tren umum yang dapat diamati adalah sebagian besar *trade openness* negara mengalami fluktuasi. Singapura memiliki tingkat *trade openness* yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, ini menunjukkan peran Singapura sebagai pusat perdagangan global yang sangat terbuka terhadap ekonomi internasional, meskipun ada penurunan kecil dalam dua tahun terakhir. Indonesia dengan tingkat keterbukaan perdagangan yang lebih rendah, kemungkinan memiliki kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada pasar domestik dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya yang lebih terbuka terhadap perdagangan internasional.

Merlitz (2018) menyatakan bahwa *trade openness* mendorong kesetaraan distribusi pasar, sehingga negara dapat memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi. Serupa halnya, Tybot (2017) berpendapat bahwa *trade openness* meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui ekspansi pasar internasional dan peningkatan kualitas modal manusia untuk meningkatkan produktivitas pasar.

Tingkat *trade openness* yang tinggi sering kali berhubungan dengan perubahan inflasi di sebuah negara. Terbukanya pasar terhadap perdagangan internasional dapat memengaruhi harga barang dan jasa dalam negeri melalui mekanisme seperti ekspor dan impor, yang pada akhirnya berdampak pada laju inflasi (Ningrum, 2024). Menurut BPS, inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Stabilitas inflasi menjadi salah satu prasyarat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Apabila inflasi terlalu tinggi, maka nilai uang akan

menurun dan menyebabkan ketidakpastian dalam perdagangan internasional serta mengurangi daya beli masyarakat (Sari, 2020). Dapat dilihat data tingkat inflasi pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Inflasi (%)

Country	2021	2022	2023
Brunei	1.7	3.7	0.4
Cambodia	2.9	5.3	2.1
Indonesia	1.6	4.2	3.7
Lao PDR	3.8	23	31.2
Malaysia	2.5	3.4	2.5
Philippines	3.9	5.8	6.0
Singapore	2.3	6.1	4.8
Thailand	1.2	6.1	1.2
Vietnam	1.8	3.2	3.3

Sumber: World Bank 2024

Inflasi di negara – negara ASEAN menunjukkan perbedaan yang mencolok. Laos mengalami lonjakan signifikan hingga 31.2% pada 2023, sementara Brunei mencatat penurunan tajam ke 0.4%. Peningkatan inflasi di Indonesia pada tahun 2022 kemungkinan dipengaruhi oleh faktor global seperti kenaikan harga komoditas dan gangguan rantai pasok, serta faktor domestik seperti kenaikan harga bahan pangan. Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi (Rohima *et al.*, 2024).

Adanya inflasi yang terlalu tinggi akan mengakibatkan harga barang naik dan merosotnya nilai uang. Hal tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan perekonomian. Tingkat inflasi yang terlalu rendah juga tidak baik bagi kegiatan ekonomi karena mengakibatkan sektor produksi tidak memiliki faktor yang mendorong kegiatan berproduksi. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi

ataupun terlalu rendah akan memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi (Masyhuri, 2018).

Selain inflasi, ada faktor lain yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi namun sering kurang diperhatikan, yaitu faktor internal berupa *good governance*. Menurut *world bank* yang dikutip dalam Merlitz (2018), *Good governance* adalah kegiatan penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang dibentuk oleh kebijakan negara, yang mencakup koordinasi yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih baik, akuntabilitas politik, dan partisipasi swasta dan publik dalam eksekusi dan penggerak kebijakan pembangunan. Indikator ini menggunakan skala dari -2.5 (lemah) hingga 2.5 (kuat), yang menggambarkan kualitas tata kelola suatu negara (*good governance*). Semakin mendekati skor 2.5, semakin baik tata kelolanya, sementara semakin mendekati -2.5, semakin lemah tata kelolanya (Adila, 2021).

Demarani (2018) menjelaskan, prinsip *good governance* memiliki 6 indikator, diantaranya *voice and accountability; political stability and absence of violence; government effectiveness; rule of law; regulatory quality; control of corruption*. Namun, fokus penelitian ini mengacu pada 3 indikator yang mewakili setiap substansi dari *good governance*, yaitu indikator *government effectiveness; voice and accountability; dan control of corruption*.

Government effectiveness merupakan ukuran tentang seberapa baik kualitas layanan publik dan kapasitas birokrasi, mencerminkan efektivitas pemerintah dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung

pembangunan (Handayani, 2016). Data *government effectiveness* ditampilkan pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 *Government Effectiveness (Indeks)*

Country	2021	2022	2023
Brunei	1.4	1.4	1.4
Cambodia	-0.5	-0.5	-0.4
Indonesia	0.3	0.3	0.4
Lao PDR	-0.7	-0.6	-0.6
Malaysia	1	1	1
Philippines	0.1	0	0.1
Singapore	2.3	2.3	2.1
Thailand	0.2	0.2	0.1
Vietnam	0.2	0.2	0.2

Sumber: World Bank 2024

Secara keseluruhan, *government effectiveness* berbagai negara menunjukkan variasi yang cukup beragam. Negara-negara seperti Singapura dan Brunei mempertahankan stabilitas tinggi, banyak faktor yang membuat skor negara Singapura sangat baik, yaitu pelayanan publik berkualitas dan menerapkan teknologi digital secara luas. Indonesia memiliki skor yang kurang baik, salah satu penyebab utamanya adalah proses administrasi yang sering kali memakan waktu lama dan kurang transparan, sehingga menghambat efektivitas pelayanan publik. Penelitian oleh Kaufmann & Kraay (2015) menyoroti pentingnya *government effectiveness* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kualitas layanan publik dan kapasitas pemerintah untuk merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan yang efektif sangat berhubungan dengan kemakmuran ekonomi suatu negara.

Indikator *good governance* berikutnya adalah *voice and accountability*. *Voice and Accountability* adalah tingkat partisipasi warga negara dalam proses

politik dan kebebasan berekspresi, mengukur seberapa besar akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat serta sejauh mana suara rakyat didengar dalam pengambilan keputusan (Montalvo, 2015).

Tabel 1. 4 Voice and Accountability (Indeks)

Country	2021	2022	2023
Brunei	-0.9	-0.8	-0.8
Cambodia	-1.4	-1.4	-1.3
Indonesia	0.1	0.1	0.1
Lao PDR	-1.8	-1.7	-1.7
Malaysia	-0.2	-0.2	0
Philippines	-0.1	-0.2	-0.1
Singapore	-0.2	-0.1	0
Thailand	-0.8	-0.8	-0.6
Vietnam	-1.4	-1.3	-1.3

Sumber: World Bank 2024

Data *voice and accountability* menunjukkan bahwa sebagian besar negara ASEAN mengalami penurunan. Negara-negara seperti Kamboja, dan Laos menunjukkan skor negatif yang stabil, menandakan kelemahan dalam akuntabilitas. Di sisi lain, Indonesia dan Filipina tidak menunjukkan kemajuan signifikan dari 2021 hingga 2023, dengan skor yang relatif stagnan. Ketiadaan kemajuan tersebut mencerminkan bahwa beberapa negara masih berjuang untuk lebih inklusif dan akuntabel. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kemajuan, banyak negara di kawasan ini masih berjuang untuk *mencapai good governance* yang lebih baik, terlihat dari skor yang masih jauh dari 2.5. Menurut Montalvo (2015), tingkat *voice and accountability* yang tinggi berkorelasi positif dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.

Indikator *good governance* lain yang juga penting yaitu *control of corruption*. Menurut Besley (2017), *control of corruption* adalah indikator yang mengukur kemampuan pemerintah untuk mengendalikan korupsi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mengukur transparansi serta akuntabilitas di sektor publik guna memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan benar.

Tabel 1. 5 Control of Corruption (Indeks)

Country	2021	2022	2023
Brunei	1.2	1.2	1.2
Cambodia	-1.3	-1.2	-1.2
Indonesia	-0.5	-0.4	-0.4
Lao PDR	-1.1	-1.1	-1.0
Malaysia	0.2	0.1	0.2
Philippines	-0.5	-0.5	-0.5
Singapore	2.1	2.1	2.1
Thailand	-0.5	-0.5	-0.5
Vietnam	-0.4	-0.3	-0.3

Sumber: World Bank 2024

Sebagian besar negara menunjukkan skor yang tetap rendah atau stagnan. Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam memiliki skor negatif yang tidak berubah signifikan, menandakan masih parahnya masalah korupsi. Di sisi lain, Singapura mempertahankan skor positif yang sangat tinggi (2.1), mencerminkan keberhasilan dalam *control of corruption*. Meskipun beberapa negara menunjukkan kemajuan dalam tata kelola, sebagian besar negara ASEAN masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian korupsi. Fazekas (2016) menyebutkan bahwa *control of corruption* yang efektif memungkinkan iklim investasi yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Penelitian ini dilakukan karena masih terbatasnya penelitian yang mengkaji hubungan antara *trade openness* dan *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan memasukkan variabel inflasi sebagai faktor yang memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana *trade openness*, inflasi, dan penerapan indikator *good governance* berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di sembilan negara ASEAN. Dengan demikian, penulis merumuskan penelitian dengan judul “Pengaruh *Trade Openness*, Inflasi dan *Good Governance* terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada 9 Negara ASEAN Tahun 2014-2023)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini memunculkan pertanyaan yaitu: Bagaimana pengaruh *trade openness*, inflasi, *government effectiveness*, *control of corruption*, *voice and accountability* terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: Menganalisis pengaruh *trade openness*, inflasi, *government effectiveness*, *control of corruption*, *voice and accountability* terhadap

pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN selama periode tahun 2014-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan yang bermanfaat sebagai sumber informasi yang selaras dengan topik penelitian, sehingga dapat terus berkembang dan diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan kontribusi khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan memfokuskan pada *trade openness*, inflasi, dan *good governance*, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang bagaimana kedua faktor tersebut mempengaruhi dinamika ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan pengetahuan bagi peneliti terkait hubungan antara *trade openness*, inflasi, dan *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengasah kemampuan analisis dalam menginterpretasikan data kebijakan publik secara komprehensif.

b. Bagi Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pengambil kebijakan dalam menyeimbangkan antara pemerintahan yang baik dan keterbukaan terhadap pasar global, guna meningkatkan daya

saing negara di pasar internasional tanpa mengabaikan stabilitas ekonomi domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila (2021). Analisis Pengaruh *Trade Openness* dan Indikator *Good Governance* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN.
- Adzima, & Baita. (2017). *The impact of governance on economic growth: an empirical assessment in Sub-Saharan Africa*. <https://ssrn.com/abstract=3470607>
- Aida, Afif, & Peni. (2021). Krisis Global dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 46–55. <https://doi.org/10.23960/jep.v10i1.214>
- Alam, & Sumon. (2020). *Causal Relationship Between Trade Openness and Economic Growth: a Panel Data Analysis of Asian Countries*. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(1), 118–126. <https://doi.org/10.32479/ijefi.8657>
- Annur. (2018). Pengaruh Good Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara di ASEAN Tahun 2007-2017.
- Assagaf. (2019). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara di ASEAN)
- Asnawi, Fitria, (2018). Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*. <http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomika>
- Astuti, & Belakang. (2020). Analisis Pengaruh *Trade Openness* dan *Foreign Direct Investment* terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Anggota Negara Asean-5 Tahun 1998-2017). In *Youth & Islamic Economic Journal* (Vol. 1, Issue 1). Januari. www.aseanstats.org
- Bashir, et al. (2023). *The Role Of Institutional Quality, Foreign Direct Investment, And Country Size On Trade Openness In The ASEAN-6 Region*. *Journal of Economic Development, Environment and People*. Volume 12, Issue 1. <http://jedep.spiruharet.ro>
- Dana, Supriyanti, & Cahyawati. (2017). *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*. Jember.
- Demarani, Finidya. (2018). *The Effect of Government and Tax Ratio to Economic Growth (Case Study in ASEAN Countries)*. Lampung
- Elia. (2023). Pengaruh *Good Governance* dan *Trade Openness* terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Negara-Negara BRICS Tahun 2014-2020).

- Emara, & Jhonsa. (2018). *Munich Personal RePEc Archive Governance and economic growth: The case of Middle Eastern and North African countries Governance and economic growth: The case of Middle Eastern and North African countries.*
- Fathia. (2018). *Analysis The Effect of Good Government Governance and Tax Revenue on Economic Growth*
- Gani. (2016). *Governance and growth in developing countries. Journal of Economic Issues*, 45(1), 19–40. <https://doi.org/10.2753/JEI0021-3624450102>
- Hakim. (2023). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Vol 4), 1283–1291. 10.47065/ekuitas.v4i4.3377
- Handayani, Fitria, & Mohamad. 2019. *Implementasi GoodGovernance di Indonesia.*
- Handayani. (2016). *Good Governance dalam Tata Kelola Perekonomian Memacu Pada Pertumbuhan Ekonomi Rakyat.* In Tri Handayani *Iqtisād* (Vol. 3, Issue 1).
- Ichvani & Sasana. (2019). *Effect Of Corruption, Consumption, Government Expenditure And Trade Opening On Economic Growth In Asean 5.* Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). Vol 4, No 1. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>
- Iskandar, *et al.* 2019. *Good Governance and Natural Resource Curse: Which Hypothesis is Prevailing in Asean Economies?*
- Iyoha, & Okim. (2017). *The Impact of Trade on Economic Growth in ECOWAS Countries: Evidence from Panel Data.* In *CBN Journal of Applied Statistics* (Vol. 8, Issue 1).
- Khalid. (2016). *The Impact of Trade Openness on Economic Growth in the Case of Turkey.* In *Research Journal of Finance and Accounting* www.iiste.org ISSN (Vol. 7, Issue 10). Online. www.iiste.org
- Liang *et al.* (2018). *The effect of governance quality on economic growth: Based on China's provincial panel data.* *Economies*, 6(4). <https://doi.org/10.3390/economies6040056>
- Marbun, Efran. (2018). *Influence Of Trade Openness, Foreign Direct Investment, and Domestic Investment to Gross Domestic Product (Gdp) of Indonesia in 1980-2016.*
- Mira, Rachid, & Hammadache. (2017). *Relationship Between Good Governance and Economic Growth: A Contribution to the Institutional Debate About State Failure in Developing Countries.*

- Nguyen, & Nguyen, T. (2018). *Institutional Quality and Economic Growth: The Case of Emerging Economies. Theoretical Economics Letters*, 08(11), 1943–1956. <https://doi.org/10.4236/tel.2018.811127>
- Ningrum. (2024). Pengaruh Pengeluaran Militer, Foreign Direct Investment, Inflasi, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 5 Negara Asean Tahun 2007-2022.
- Prijambodo, Bambang. (2016). *Teori Pertumbuhan Endogen: Tinjauan Teoritis Singkat dan Implikasi Kebijaksanaannya*. Indonesia.
- Putri. (2019). Analisis Pengaruh Keterbukaan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus, ASEAN Tahun 2007–2017).
- Putri. (2021). Pengaruh *Trade Openness* dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam dengan Pendekatan *Error Correction Model*.
- Ramadhan. (2021). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-6.
- Riamurty. (2024). Pengaruh *Trade Openness*, *Foreign Direct Investment*, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2013-2022.
- Rohima *et al.* (2024). Analisis Efek Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *JURNAL PROFIT: Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*. Volume 11 (1), 2024, 40-48. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jp>
- Sajiah. (2017). *Analysis of The Effect of Good Government Governance on Tax Revenue*.
- Samarasinghe, Tharanga. 2018. *Impact of Governane on Economic Growth*.
- Wibowo, Edy. (2016). Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN Jurnal Ilmiah.
- Widjanarko. (2021). *Analisis Hubungan Good Governance Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2013-2019*.
- Wilson, R. (2016). *Does Governance Cause Growth? Evidence from China. World Development*, 79, 138–151. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.015>
- Yanikkaya, H. (2013). *Trade openness and economic growth: A cross-country empirical investigation. Journal of Development Economics*, 72(1), 57–89.

[https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(03\)00068-3](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(03)00068-3)

Yuliana, *et al.* (2023). Pengaruh Utang Luar Negeri, Investasi Asing Langsung, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 7 Negara Asean Periode 2012-2020. Vol. 17, No. 3. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2187>